

## **INTISARI**

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. kabupaten/kota dapat dikatakan terjadi ketergantungan fiskal, apabila pembiayaan suatu daerah lebih banyak dibiayai oleh penerimaan dari pusat (dana perimbangan) dibanding dengan penerimaan dari daerah (Pendapatan Asli Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kemampuan keuangan daerah dan untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu perkembangan APBD Provinsi Nusat Tenggara Barat yang diperoleh dari Biro Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kinerja keuangan dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah semakin berkurang, mengingat daerah tersebut tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, dan semakin tinggi kinerja kemampuan keuangan daerah, yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Indikator Kinerja keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal.